

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Peran DPRD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen tahun 2020 berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat (1) pada pelaksanaan bentuk, tahapan dan skema pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen melalui Komisi D ini cukup efektif dan waktu pelaksanaan monitoring lapangan, rapat kerja, penyerapan aspirasi masyarakat berdampak pada perbaikan di lapangan serta penyempurnaan program pembangunan infrastruktur. Hal ini dibuktikan dari tindak lanjut pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen dengan memberikan rekomendasi yang hampir selalu ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR Kabupaten Kebumen baik saat terjadi temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau mutu kualitas pembangunan, misalnya peneliti memberikan analisis salah satu kasus temuan pada jembatan kaligending-karangrejo tahap 1 maupun atas ketidaktercapaian program pembangunan infrastruktur saat DPRD Kabupaten Kebumen melalui Komisi D memberikan rekomendasi atas LKPJ di akhir tahun. Namun, adapun pemahaman dan pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Kebumen yang masih perlu ditingkatkan lagi terkait pembangunan infrastruktur karena anggota DPRD Kabupaten Kebumen memiliki *political background* yang berbeda-beda. (2) Adanya hubungan DPRD Kabupaten Kebumen dan Dinas PUPR Kabupaten

Kebumen yang saling transparan dan keduanya memiliki komitmen yang kuat dalam merealisasi target pembangunan, hal ini dibuktikan dalam kerjasama keduanya dalam pembahasan program atau anggaran, pelaksanaan pengawasan rapat kerja yang dilaksanakan setiap bulan dan mengundang Dinas PUPR Kabupaten Kebumen untuk melakukan klarifikasi atas suatu temuan, pertanggungjawaban melalui monitoring kinerja setiap triwulan dengan Dinas PUPR yang memberikan dampak atas capaian pembangunan di Kabupaten Kebumen di tahun 2020, sehingga terselenggara dengan baik dan sesuai dengan target, hal ini dilihat dari capaian target pembangunan infrastruktur yang hampir semua program tercapai. Namun, hal ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen, karena adanya hambatan yaitu keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, terlebih di tahun 2020 yang difokuskan untuk penanganan covid-19, sehingga dibentuk program prioritas Kabupaten Kebumen. (3) Adapun analisis hubungan *Political Interests* DPRD Kabupaten Kebumen dengan pengawasan pembangunan infrastruktur, ketertarikan DPRD akan pengawasan pembangunan infrastruktur, ini akan mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur, baik dalam proses perumusan kebijakan hingga pada selesainya proyek pembangunan, namun DPRD Kabupaten Kebumen harus lebih aktif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen melalui kekuatan politik yang dimilikinya (4) Keberhasilan capaian program pembangunan infrastruktur

ini juga melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan serta partisipasi peserta tender dalam konstruksi pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dan kesepakatan dengan Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Meskipun demikian, ruang partisipasi masyarakat masih belum cukup luas dan masyarakat ingin lebih diikutsertakan dalam proses pengawasan.

4.2 Saran

Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Untuk DPRD Kabupaten Kebumen

Perlunya peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD, karena anggota DPRD memiliki *political background* yang berbeda, dengan ini akan meningkatkan kemampuan anggota dalam mengkritisi program-program pembangunan infrastruktur. Diperlukan strategi untuk memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas untuk masyarakat terutama dalam hal pengawasan, agar kebijakan terkait pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen, hal ini juga akan membangun *trust*, konsistensi dan komitmen DPRD sebagai wakil rakyat. Membangun konsistensi hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah terutama dalam perencanaan dan pengawasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, agar kemampuan anggaran yang masih minim di Kabupaten Kebumen, mampu digunakan sebaik-baiknya dengan melihat kebutuhan masyarakat.

b. Untuk Masyarakat Kabupaten Kebumen

Memanfaatkan ruang publik dan yang ada untuk memberikan saran, masukan dan aspirasinya kepada DPRD dan Pemerintah Daerah, baik melalui aduan, audiensi, maupun kegiatan *hearing* dan reses. Sudah semestinya masyarakat menjadi subjek dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik dalam perumusan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.